

OPINI PESERTA TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Ansyah Syam¹, Tuti Bahfiarti²

¹Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat*

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu, Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ***

ABSTRACT

This research aimed to analyze: 1) the opinions of participants and 2) the differences in opinion between pass and don't pass participant on the level of transparency of the selection CPNS acceptance through CAT methods in the Badan Kepegawaian Daerah of West Sulawesi province. This type of research is survey method with quantitative approach. Data were analyzed with descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics illustrate the participants' opinion on the level of transparency of the selection of civil servants recruitment through CAT method while inferential statistics to take conclusions on the research hypothesis. The population in this study is all of the participants who follow the selection CPNS acceptance at BKD of West Sulawesi province in 2013. A sampling technique which used is stratified random sampling with a sample of 100 people consisting of 50 pass participants and 50 participants did not pass. Results of the research showed the following findings : 1) Opinion participants on the level of transparency of selection CPNS acceptance through CAT method for each dimension of the average are in the good category; 2) There are no mean differences in participants' opinion (both pass and did not pass) on the dimensions of information disclosure and information availability, but there are mean differences in participant opinion (both pass and did not pass) on the dimensions of easy to understand. Even if there are differences, but most of the dimensions are in the good categories so this shows that the participants' opinion on the level of transparency of the selection CPNS acceptance methods through the CAT at BKD of West Sulawesi very positive.

Keywords: Transparency; Selection CPNS; Computer Assisted Test (CAT)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui opini peserta dan 2) perbedaan opini peserta lulus dan tidak lulus terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menggambarkan opini peserta terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui metode CAT sedangkan statistik inferensial untuk mengambil kesimpulan atas hipotesis penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan *stratified random sampling* dengan jumlah sampel 100 orang yang terdiri atas 50 orang peserta lulus dan 50 orang peserta tidak lulus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Opini peserta terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT untuk setiap dimensi rata-rata berada pada kategori baik; 2) Tidak ada perbedaan opini peserta lulus dan tidak lulus pada dimensi keterbukaan informasi dan ketersediaan informasi namun ada perbedaan opini pada dimensi mudah dimengerti. Sekalipun ada perbedaan namun rata-rata aspek pada dimensi tersebut berada pada kategori baik sehingga hal ini menunjukkan bahwa opini peserta terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT pada badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat sangat positif.

Kata kunci : *Transparansi; Penerimaan CPNS; Computer Assisted Test*

PENDAHULUAN

Selama ini proses rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh pemerintah dipandang belum mampu mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses dan prosedur rekrutmen banyak dinilai publik cenderung diwarnai oleh praktik-praktik *spoil system*, yang masih cenderung mengedepankan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas PNS. Kualitas PNS akan sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen yang merupakan bagian dari pada proses aktivitas untuk mencari dan menemukan PNS yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Proses penerimaan seleksi pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dinilai masih sangat buruk dan menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses pendaftaran yang rumit ditambah seleksi yang konvensional menunjukkan sejak dini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dikondisikan dalam sebuah situasi kerja yang birokratis, “*superficial*”, serta tidak berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh.

Indikasi penyimpangan hampir setiap tahun terjadi pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan oknum pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mafia, perantara, oknum bupati/walikota hingga oknum panitia

seleksi. Pada tahun 2004 untuk sektor pendidikan dan kesehatan terdapat 205.584 Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dan di duga 60% yang lulus membayar rata-rata Rp. 50 juta sehingga total uang pelicin yang masuk ke oknum pejabat mencapai Rp. 6 triliun (www.lowonganCPNS.org)

Buruknya proses penerimaan dan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia juga dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang bermasalah dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2010. Jika sebelumnya hanya 40 daerah yang dilaporkan ada kecurangan selama seleksi, kini menjadi 41 daerah.

Data terkini dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) menyebutkan, dari 41 daerah itu ada sekitar 14 kabupaten/kota daerah itu ada disekitar 14 kabupaten/kota yang sudah diinvestigasi dan masuk dalam tahap *scan* ulang Lebar Jawaban Komputernya (LJK). Daerah-daerah tersebut yaitu : Sumatera Utara (6 Kabupaten/kota), Jambi (8 Kabupaten), Sumatera Barat (2 Kabupaten), Riau (1 Kabupaten), Bangka Belitung, Lampung Kalteng, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten), Sulawesi Utara (3 Kabupaten), Sulawesi Selatan (2 Kabupaten), Maluku (2 Kabupaten), Maluku Utara, Jawa Timur (3 Kabupaten), Sulawesi Barat, Jawa

Tengah (3 Kabupaten) (www.waspada.co.id) .

Kecurangan yang terjadi tidak hanya karena oknum pejabat yang bersangkutan, tapi juga karena sistem manual atau yang disebut dengan metode *konvensional*. Sistem manual dikenal dengan sistem yang dilakukan dengan LJK terpusat. Sistem perekrutan dengan metode *konvensional* membuat perekrutan CPNS rawan kecurangan

Sistem perekrutan di atas, juga mengakibatkan proses rekrutmen CPNS rawan penyelewengan, hal ini sebagaimana dilansir *Malang Corruption Watch* (MCW) menyebutkan sebanyak 10 titik kerawanan penyelewengan proses rekrutmen CPNS. Menurut Koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin penyelewengan tersebut melibatkan pejabat pemerintah, panitia seleksi, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Termasuk seleksi jalur honorer kategori 2 dan jalur umum. Kesepuluh titik rawan itu antara lain kebocoran soal ujian, perjokian, suap, penyelundupan data dan saling titip pejabat lintas daerah.” (www.tempo.co.id) .

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan, seleksi CPNS khususnya yang menggunakan sistem lembar jawaban komputer (LJK) rawan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan berbagai penyimpangan lain. Untuk mencegah hal itu, seluruh proses pelaksanaannya harus transparan. Transparansi menjadi prinsip utama mencegah KKN. (www.menpan.go.id)

Guna mengatasi lemahnya sistem konvensional yang sarat akan kecurangan, maka instansi pemerintah meningkatkan kualitas Pegawai dalam hal proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penggunaan alat bantu komputer atau disebut *Computer Assisted Test* (CAT).

Rekrutmen pegawai menurut Prihadi (2004) adalah proses mengidentifikasi kecocokan terbaik antara jabatan dan orang, baik kandidat internal (penempatan dan promosi) maupun pelamar eksternal (rekrutmen dan seleksi pegawai baru). Pemerintah meningkatkan kualitas pegawai dalam hal proses seleksi penerimaan CPNS melalui penggunaan alat bantu komputer atau disebut *Computer Assisted Test* (CAT).

Menurut Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS BKN (2010), sistem rekrutmen model CAT ini menggunakan pendekatan *computerize*, artinya sistem seleksi CPNS akan menjalankan tes seleksi dengan menggunakan komputer secara langsung dan hasil penilaian melalui *grade*-nya bisa dilihat pada saat itu juga.

Menggunakan *computerize* menjadikan sistem CAT sebagai terobosan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam bidang reformasi Birokrasi. Penerapan TIK pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarnan (2009), yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Tujuan CAT adalah meningkatkan transparansi, obyektivitas, akuntabilitas dan efisiensi. Menurut Sinambela (2006), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang salah satunya tercermin dari transparansi. Dengan memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi itu, maka masyarakat dan *stakeholders* dapat menilai sejauhmana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan mereka dan mengambil sikap yang tepat dalam merespons kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Dengan konsep transparansi informasi yang diusung oleh seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT diharapkan bisa menciptakan opini yang positif terhadap pemerintah dalam hal penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS.

Penerapan *Computer Assisted Test (CAT)* pertama kali di Indonesia pada tahun 2010 yang diselenggarakan oleh BKN Pusat. Adapun untuk penerapan di daerah, BKN Pusat berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah menerapkan CAT dalam rekrutmen CPNS untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2013 bertempat di Kantor Regional IV BKN Makassar. BKD provinsi Sulawesi Barat adalah instansi pemerintah daerah di Indonesia Timur yang

pertama melaksanakan seleksi penerimaan CPNS berbasis CAT

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini peserta dan perbedaan opini peserta lulus dan tidak lulus terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode *Computer Assisted Test (CAT)* pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Teknologi Komunikasi dan Informasi

Menggunakan *computerize* menjadikan sistem CAT sebagai terobosan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam bidang reformasi Birokrasi. Teknologi komunikasi (TK) menurut Rogers (1986), adalah peralatan perangkat keras (*hardware*) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Sedangkan menurut Ishak (2008), teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Penerapan TIK pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009), yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Menurut Jogiyanto

(2003), mengungkapkan bahwa teknologi informasi mempunyai peran utama di dalam organisasi yaitu untuk meningkatkan: efisiensi; efektivitas; komunikasi; dan kompetitif

Salah satu teori komunikasi klasik yang sangat mempengaruhi teori-teori komunikasi selanjutnya adalah teori informasi atau teori matematis. Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren (1949,), *Mathematical Theory of Communication*

Teori Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana *transmitter* menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya (*encoding* dan *decoding*).

Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang mempengaruhi tingkah laku atau *state of mind* pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui dimana letak kegagalannya. Selain itu mazhab proses juga cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan diri pada tindakan komunikasi.

Teori informasi Shannon menganggap bahwa informasi dapat dihitung jumlahnya, dan bahwa informasi bersumber atau bermula dari suatu kejadian. Jumlah informasi yang dapat dikaitkan, atau dihasilkan oleh, sebuah keadaan atau kejadian merupakan tingkat pengurangan (reduksi) ketidakpastian, atau pilihan kemungkinan, yang dapat muncul dari keadaan atau kejadian tersebut. Dengan kata yang lebih sederhana, teori ini berasumsi bahwa kita memperoleh informasi jika kita memperoleh kepastian tentang suatu kejadian atau suatu hal tertentu. (Agnes, 2013: 76).

Opini

Dan Nimmo (2005:10) mengemukakan bahwa opini ialah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai, dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu. Dengan demikian publik adalah pendapat khalayak terhadap sesuatu objek atau situasi tertentu yang dipercayai, dinilai baik dan benar atau diharapkan. Tindakan tersebut bisa merupakan pemberian suara, pernyataan verbal, dokumen tertulis atau bahkan diam; singkatnya apapun yang bermakna adalah ungkapan opini.

Proses pembentukan opini publik dalam setiap kasus berbeda-beda, ada yang cepat, lambat, bahkan ditangguhkan. Faktor-faktor tertentu membatasi dan mempengaruhi sejumlah fakta, pengalaman dan penilaian yang menjadi dasar pembentukan opini. Ada kemungkinan terjadi sejumlah kombinasi antar faktor yang menguatkan kesamaan opini, tetapi ada sejumlah faktor lain yang menguatkan keanekaragaman

opini. Seperti terlihat dalam gambar dibawah tentang proses terbentuknya opini seseorang (Cangara, 2014:135).

Perbedaan opini ini menurut Melvin De Fleur (McQuail, 1994 : 235) telah dijelaskan dalam teori perbedaan individu (*the individual differences theory of mass communication effects*) dengan asumsi bahwa masing-masing individu memiliki motivasi dan pengalaman yang berbeda sebagai hasil belajar dari lingkungannya yang berbeda-beda pula. Dari lingkungannya yang berbeda ini, akan terbentuk sikap, kecerdasan, minat, nilai-nilai serta kepercayaan individu yang mendasari kepribadian mereka, kemudian akan mempengaruhi cara mereka memandang dan menghadapi sesuatu. Sehingga, persepsi mereka pun ikut berbeda sehubungan dengan perbedaan kepribadian. Hal ini khususnya relevan bila dikaitkan dengan kerumitan pesan media umumnya dan bila dibandingkan dengan jenis rangsangan yang digunakan dalam hampir seluruh percobaan psikologi

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Menurut Kim (2007), adapun unsur-unsur transparansi meliputi: kejelasan (*clarity*) dalam arti mudah dipahami/dimengerti

oleh masyarakat, aksesibilitas (*accessibility*) dalam arti adanya pertukaran informasi dua arah, integrasi (*integration*) dalam arti dapat menjelaskan dan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan masyarakat, serta rasional (*rationality*) dalam arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi, formal, dan dapat diupgrade. Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Ratminto dan Winarsih, 2005).

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dengan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktek penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggara pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi (Rusli, 2004)

Dari pengertian transparansi diatas maka transparansi penerimaan CPNS melalui metode CAT adalah bahwa segala informasi yang ada pada seleksi ini harus memenuhi unsur keterbukaan informasi, ketersediaan informasi dan mudah dimengerti.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana opini peserta lulus dan tidak lulus terhadap tingkat transparansi CPNS melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat
2. Adakah perbedaan opini antara peserta lulus dan peserta tidak lulus terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat

METODE

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat. Dimana Provinsi Sulawesi Barat adalah instansi pemerintah daerah pertama di Indonesia Timur yang melaksanakan seleksi penerimaan CPNS berbasis *Computer Assisted Test* pada tahun 2013. Pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan mengambil lokasi tes di kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian survei. Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan datanya (Kriyantono, 2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan kuantitatif dapat menghasilkan data yang akurat setelah penghitungan yang tepat. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang lebih ditekankan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh. Penelitian kuantitatif pun sifatnya adalah objektif, sehingga kita bisa melihat langsung sebuah keadaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta baik yang lulus maupun tidak lulus yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 yaitu sebesar 8.170 orang yang terdiri dari 114 peserta lulus dan 8056 peserta tidak lulus. Besaran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin untuk populasi yang diketahui jumlahnya (Kriyantono, 2012) yaitu $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$, dimana n adalah jumlah sampel, N adalah ukuran populasi dan e adalah kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir sebesar 10%, sehingga ukuran sampel yang diperoleh adalah 99 orang.

Populasi terdiri atas peserta lulus dan tidak lulus, dengan perbandingan peserta lulus dan tidak lulus yaitu 114 : 8056, bila pengambilan sampel dilakukan secara proporsional untuk

kedua kelompok peserta lulus dan peserta tidak lulus maka untuk sampel sebesar 99 orang akan diperoleh sampel 1 dari peserta lulus dan 98 dari peserta tidak lulus hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan jawaban responden tidak objektif karena didominasi oleh peserta yang tidak lulus untuk itu peneliti membagi proporsi sampel secara rata yaitu 50% sampel dari populasi peserta lulus dan 50% sampel dari populasi peserta yang tidak lulus. Karena ukuran sampel 99 orang maka sampel untuk kedua kelompok itu adalah $99/2 = 49,5$ yang dibulatkan menjadi 50 sehingga sampel peserta lulus sebanyak 50 orang dan peserta tidak lulus sebanyak 50 orang.

Mengingat populasi dalam kelompok tersebut terdiri dari peserta dalam formasi yang berbeda, yaitu tenaga guru, kesehatan, teknis maka agar sampel yang diambil mewakili setiap formasi maka teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik *proporsional stratified random sampling* untuk setiap formasi pada kedua kelompok peserta.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan secara langsung melalui informan dengan menggunakan kuisisioner atau angket (Sugiyono, 2005). Sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi atau data yang dikumpulkan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Kuisisioner penelitian ini menggunakan skala Likert 5 (interval 5). Adapun jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner adalah 39 pernyataan yang bisa dilihat pada tabel dibawah

Variabel Transparansi	Indikator	Jumlah Butir
a. Keterbukaan Informasi	1. Pendaftaran	2
	2. Prosedur/tata cara	1
	3. Persyaratan	2
	4. Biaya	1
	5. Formasi yang dilamar	1
	6. waktu dan lokasi	1
	7. kuota formasi	1
	8. Rencana penempatan	1
	9. Tes CAT	1
	10. Pengumuman skoring	1
	11. Pengumuman kelulusan	2
b. Ketersediaan Informasi	1. Sumber Informasi	2
	2. Waktu ketersediaan	1
	3. Kemudahan akses	2
	4. layanan pengaduan	2
	5. adanya Solusi	1
	6. waktu dan lokasi	1
	7. Tutorial Tes CAT	1
	8. Informasi Hasil Skoring	1
	9. Informasi Kelulusan	2
c. Mudah dimengerti/dibaca	1. Pengumuman pendaftaran	2
	2. Persyaratan pendaftaran	1
	3. Tata cara pendaftaran	1
	4. Tampilan Website	1
	5. Tutorial Tes CAT	1
	6. soal tes	1
	7. instruksi panitia tes	1
	8. Tampilan Tes CAT	1
	9. Pengumuman kelulusan	2
	10. Pengumuman skoring	1

ini :

Tabel 1 Kisi-Kisi Instrumen untuk Mengukur Tingkat Transparansi Seleksi CPNS melalui Opini peserta

Analisis Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menggambarkan opini peserta terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui metode CAT sedangkan statistik inferensial untuk mengetahui ada

tidaknya perbedaan opini peserta baik lulus maupun tidak lulus terhadap tingkat transparansi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui metode CAT.

Opini peserta diukur dari jawaban responden akan kuisioner. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui statistik deskriptif yang berupa tabel frekuensi dari masing-masing variabel dengan lima kriteria penilaian. Lima kriteria penilaian ini terdiri atas 5 tingkatan dari sangat baik/jelas memadai sampai sangat tidak baik/jelas/memadai dimana jumlah skor tergantung dari jumlah responden dan banyaknya pertanyaan.

Statistik inferensial menggunakan uji beda. Uji beda digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Uji beda terbagi atas *Mann Whitney U-Test* dan *Independent T-Test*. Penggunaan kedua uji ini tergantung dari normalitas data. Jika data berdistribusi normal menggunakan *Independent T-Test* dan jika data tidak berdistribusi normal menggunakan *Mann Whitney U-Test*. Dalam perhitungan pengolahan

data, peneliti mempergunakan alat bantu yang berupa aplikasi komputer yaitu SPSS for windows 18,0

HASIL

Karakteristik responden merupakan gambaran dari keberadaan responden yang terlibat dalam penelitian yaitu berdasarkan pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Dari seluruh peserta yang menjadi sampel yang berjumlah 100 orang yang diberikan kuisioner, semuanya mengisi dan mengembalikan kuisioner yang dibagikan.

Karakteristik responden penelitian ini yakni sebanyak 53 (53%) responden berpendidikan diploma tiga dan lebihnya sarjana; mayoritas responden berada pada kelompok umur 25-28 yaitu sebesar 81 (81%); dan mayoritas jenis kelamin responden adalah wanita yakni 64 (64%).

Deskripsi Opini Peserta terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT

Ada tiga dimensi yang menjadi indikator transparansi yaitu : keterbukaan informasi, ketersediaan informasi dan mudah dimengerti. Pada tabel 2 memperlihatkan hasil analisis deskriptif opini peserta terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT dihubungkan dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap unit instansi pemerintah daerah sesuai dengan KEP/25/M/PAN/2/2004.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Opini Peserta

No	Indikator Transparansi	Kategori	Mean	Persentasi Mean	Kategori Penilaian
1.	Keterbukaan Informasi	Peserta Lulus	58,6	84,1	Baik
		Peserta Tidak Lulus	54,9	78,4	Baik
2.	Ketersediaan Informasi	Peserta Lulus	51,02	78,5	Baik
		Peserta Tidak Lulus	46,94	72,2	Baik
3.	Mudah dimengerti	Peserta Lulus	50,8	84,7	Sangat Baik
		Peserta Tidak Lulus	46,36	77,3	Baik

Sumber : Data Primer diolah, 2015

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata opini peserta baik yang lulus maupun tidak lulus terhadap semua dimensi transparansi berada pada kategori baik, namun peserta beropini sangat baik pada dimensi mudah dimengerti.

Perbedaan Opini peserta

Untuk mengetahui perbedaan opini peserta antara peserta lulus dan tidak lulus digunakan uji *Mann Whitney U-Test* hal ini dikarenakan data kedua kelompok ini berdistribusi normal. Tabel berikut ini adalah hasil analisis perbedaan opini peserta

Tabel 3. Hasil Analisis perbedaan opini dengan uji *Mann Whitney*

No	Indikator Transparansi	Kategori	Mean	Nilai P uji rata-rata beda	Ket.
1.	Keterbukaan Informasi	Peserta Lulus	58,6	0,117	Tidak ada perbedaan
		Peserta Tidak Lulus	54,9		
2.	Ketersediaan Informasi	Peserta Lulus	51,02	0,059	Tidak ada perbedaan
		Peserta Tidak Lulus	46,94		
3.	Mudah dimengerti	Peserta Lulus	50,8	0,001	Ada Perbedaan
		Peserta Tidak Lulus	46,36		

Sumber : Data Primer diolah, 2015

Pada tabel 3 memperlihatkan hasil analisis perbedaan opini peserta dengan menggunakan hasil dari nilai signifikan (nilai p) *Mann Whitney U-Test*. Dari tabel terlihat bahwa pada variabel keterbukaan informasi diperoleh nilai p sebesar $0,117 > 0,05$ dan pada variabel ketersediaan informasi diperoleh nilai p sebesar $0,059 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata opini peserta peserta baik yang lulus maupun tidak lulus terhadap keterbukaan dan ketersediaan informasi, sedangkan pada variabel mudah dimengerti diperoleh nilai p sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga disimpulkan ada perbedaan yang signifikan rata-rata opini peserta lulus dan tidak lulus terhadap variabel mudah dimengerti.

PEMBAHASAN

Analisis Opini peserta terhadap seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT

Berdasarkan hasil analisis data pada setiap dimensi dari transparansi yaitu keterbukaan, ketersediaan, dan mudah dimengerti, secara umum diperoleh bahwa rata-rata opini peserta lulus dan tidak lulus berada pada kategori baik. Berdasarkan pembahasan pada setiap dimensi dari transparansi yaitu keterbukaan, ketersediaan, dan mudah dimengerti, secara umum diperoleh bahwa rata-rata opini peserta lulus dan tidak lulus berada pada kategori baik dan sangat baik untuk setiap tahapan seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT. Penggunaan metode CAT untuk seleksi penerimaan CPNS dapat meningkatkan opini, yang tadinya publik beropini negatif terhadap

pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS namun kini dengan adanya metode CAT terbentuk opini yang positif bagi publik.

Hal ini sejalan dengan asumsi teori deterministik teknologi yang disampaikan oleh McLuhan yang mengatakan bahwa “ kita belajar, merasa dan berpikir terhadap apa yang kita lakukan karena pesan yang diterima teknologi menyediakan untuk itu”. Artinya teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Dengan pemanfaatan *Computer Assisted Test* (CAT) dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dari teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi.

Penerapan TIK pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009), yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Metode pemanfaatan TIK dalam metode CAT dinilai efektif dan efisien karena transparansi seleksi penerimaan CPNS bisa membentuk opini yang positif. Sehingga pemanfaatan TIK dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Proses pemanfaatan teknologi CAT dalam seleksi penerimaan CPNS dalam aplikasinya merupakan proses komunikasi secara detail

dimana pesan sesuai asumsi teori informasi yang dikemukakan oleh Shannon and Warren Weaver (1949, Weaver. 1949b), *Mathematical Theory of Communication*. Asumsi model komunikasi oleh Shannon and Weaver adalah pada bagian pertama dari proses informasi adalah sumber informasi yang menciptakan pesan atau rangkaian pesan untuk dikomunikasikan. Pada tahap berikutnya pesan diubah dalam bentuk sinyal oleh transmisi sehingga disalurkan kepada penerima. Penerima lalu menyusun kembali sinyal menjadi pesan sehingga mencapai tujuan.

Pada teori informasi atau teori matematis melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Dalam hal ini CAT memanfaatkan jaringan internet sebagai saluran dan media penyebaran informasinya. Dengan penggunaan alat bantu komputer diharapkan akurasi lebih tinggi dan juga memberikan efisiensi baik dari biaya maupun waktu. Transparansi informasi sebagai tujuan pemanfaatan teknologi ini tercapai yang ditunjukkan dengan terbentuknya opini peserta yang baik terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT.

Keberadaan metode CAT yang digunakan pada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah terbukti menimbulkan peningkatan kualitas yang

mengubah opini peserta seleksi CPNS yang tadinya kebanyakan beropini negatif namun berubah menjadi positif.

Konsep yang dikembangkan oleh Shannon and Weaver menegaskan bahwa untuk memahami informasi, kita perlu berasumsi bahwa semua tujuan komunikasi adalah mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Teori yang dikembangkan Shannon dan Weaver menyederhanakan persoalan komunikasi ini dengan memakai pemikiran-pemikiran probabilitas (kemungkinan). Para peserta seleksi penerimaan CPNS membentuk opini yang positif terhadap metode CAT karena dengan keterbukaan, ketersediaan informasi dan mudah dimengerti sehingga bisa mengatasi ketidakpastian informasi yang terjadi.

Teori informasi Shannon juga menganggap bahwa informasi dapat dihitung jumlahnya, dan bahwa informasi bersumber atau bermula dari suatu kejadian. Jumlah informasi yang dapat dikaitkan, atau dihasilkan oleh sebuah keadaan atau kejadian merupakan tingkat pengurangan (reduksi) ketidakpastian, atau pilihan kemungkinan, yang dapat muncul dari keadaan atau kejadian tersebut. Dengan kata yang lebih sederhana, teori ini berasumsi bahwa kita memperoleh informasi jika kita memperoleh kepastian tentang suatu kejadian atau suatu hal tertentu.

Teori yang dikemukakan Shannon and weaver sejalan dengan penggunaan teknologi baru (*new media*) yaitu *Computer Assisted Test* dalam

seleksi penerimaan CPNS, teknologi ini dianggap mampu mengurangi ketidakpastian informasi. Peserta memberi opini yang baik atas informasi yang diberikan oleh metode ini baik dari segi keterbukaan informasi, ketersediaannya dan informasinya mudah dimengerti sehingga mengidentifikasi bahwa metode ini benar-benar mengukung konsep transparansi informasi.

Transparansi informasi adalah salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *Good Governance* adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam pengadaan sumber daya pegawai negeri sipil yang berkualitas dan handal dilakukan melalui seleksi yang ketat yaitu dengan menggunakan seleksi sistem komputer atau metode *Computer Assisted Test*.

Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 telah menggunakan metode baru yaitu metode *Computer Assisted Test* (CAT). Metode CAT adalah suatu metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapat standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. Tujuan CAT itu adalah mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, menciptakan menstandarisasi hasil ujian nasional, menetapkan standar nilai, dan meningkatkan transparansi, obyektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Menurut L.P Sinambela, (2006:6), salah satu tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima dari beberapa unsur yang salah satu unsur adalah transparansi. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah mengerti (Ratminto dan Winarsih, 2005).

Transparansi sebagai salah satu unsur dari kualitas pelayanan prima juga menjadi salah satu tujuan CAT. Untuk itu perlu mengukung konsep transparansi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui metode CAT. Dengan mengukung konsep transparansi dalam sistem ini diharapkan tercipta opini publik yang positif selaku peserta seleksi. Namun opini publik itu tergantung stimulus yang diterima.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh opini yang positif terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT karena informasi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta tersedia secara memadai dan mudah dimengerti. Hal ini sesuai dengan konsep transparansi yang dikemukakan Ratminto dan Winarsih (2005). Dengan terpenuhinya konsep transparansi sebagai perwujudan kualitas pelayanan prima maka tujuan pelayanan publik tercapai yaitu memuaskan masyarakat dengan begitu seleksi penerimaan CPNS melalui metode *Computer Assisted Test* bisa memuaskan masyarakat pada umumnya dan peserta pada khususnya.

Hal ini menunjukkan opini yang positif terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS karena informasi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta tersedia secara memadai dan mudah dimengerti. Hal ini sesuai dengan konsep transparansi yang dikemukakan Ratminto dan Winarsih (2005), yakni transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah mengerti.

Penggunaan metode CAT untuk seleksi penerimaan CPNS sangatlah efektif, yang tadinya publik beropini negatif terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS namun dengan adanya metode CAT terbentuk opini yang positif. Hal ini sejalan dengan asumsi teori deterministik teknologi yang disampaikan oleh McLuhan dalam Ermelinda (2013) yang mengatakan bahwa “ kita belajar, merasa dan berpikir terhadap apa yang kita lakukan karena pesan yang diterima teknologi menyediakan untuk itu”. Artinya teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Dengan pemanfaatan *Computer Assisted Test* (CAT) dalam seleksi penerimaan CPNS mengubah opini publik. Teknologi membentuk individu untuk berfikir cara yang lebih baik dan mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi.

Penerapan TIK pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Adapun

yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009), yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Metode pemanfaatan TIK dalam metode CAT dinilai efektif dan efisien karena transparansi seleksi penerimaan CPNS bisa membentuk opini yang positif. Sehingga pemanfaatan TIK dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Proses pemanfaatan teknologi CAT dalam seleksi penerimaan CPNS dalam aplikasinya merupakan proses komunikasi secara detail yang sesuai dengan asumsi teori informasi yang dikemukakan oleh Shannon and Warren Weaver dalam Ermelinda (2013), dimana asumsi pada bagian pertama dari proses informasi adalah sumber informasi yang menciptakan pesan atau rangkaian pesan untuk dikomunikasikan. Pada tahap berikutnya pesan diubah dalam bentuk sinyal oleh transmisi sehingga disalurkan kepada penerima. Penerima lalu menyusun kembali sinyal menjadi pesan sehingga mencapai tujuan.

Pada teori informasi atau teori matematis melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif. Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Dalam hal ini CAT memanfaatkan jaringan internet sebagai saluran dan media penyebaran informasinya. Dengan penggunaan alat bantu komputer diharapkan akurasi lebih tinggi dan juga memberikan efisiensi baik dari

biaya maupun waktu. Transparansi informasi sebagai tujuan pemanfaatan teknologi tercapai yang ditunjukkan dengan terbentuknya opini peserta yang baik terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT. Sehingga keberadaan metode CAT yang digunakan pada seleksi penerimaan CPNS pada Badan Kepegawaian Daerah terbukti menimbulkan peningkatan kualitas yang mengubah opini peserta seleksi CPNS yang tadinya kebanyakan beropini negatif namun berubah menjadi positif.

Konsep yang dikembangkan oleh Shannon and Weaver menegaskan bahwa untuk memahami informasi, kita perlu berasumsi bahwa semua tujuan komunikasi adalah mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Teori yang dikembangkan Shannon dan Weaver menyederhanakan persoalan komunikasi ini dengan memakai pemikiran-pemikiran probabilitas (kemungkinan). Para peserta seleksi penerimaan CPNS membentuk opini yang positif terhadap metode CAT karena dengan keterbukaan, ketersediaan informasi dan mudah dimengerti sehingga bisa mengatasi ketidakpastian informasi yang terjadi.

Teori yang dikemukakan Shannon and weaver sejalan dengan penggunaan teknologi baru (*new media*) yaitu *Computer Assisted Test* dalam seleksi penerimaan CPNS, teknologi ini dianggap mampu mengurangi ketidakpastian informasi. Peserta memberi opini yang baik atas informasi yang diberikan oleh metode ini baik dari segi keterbukaan informasi, ketersediaannya

dan informasinya mudah dimengerti sehingga mengidentifikasi bahwa metode ini benar-benar mengukung konsep transparansi informasi.

Transparansi informasi adalah salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *Good Governance* adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam pengadaan sumber daya pegawai negeri sipil yang berkualitas dan handal dilakukan melalui seleksi yang ketat yaitu dengan menggunakan seleksi sistem komputer atau metode *Computer Assisted Test*.

Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 telah menggunakan metode baru yaitu metode *Computer Assisted Test* (CAT). Metode CAT adalah suatu metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapat standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. Tujuan CAT itu adalah mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, menciptakan menstandarisasi hasil ujian nasional, menetapkan standar nilai, dan meningkatkan transparansi, obyektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Menurut L.P Sinambela, (2006:6), salah satu tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima dari beberapa unsur yang salah satu unsur adalah transparansi. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah mengerti (Ratminto dan Winarsih, 2005).

Transparansi sebagai salah satu unsur dari kualitas pelayanan prima juga menjadi salah satu tujuan CAT. Untuk itu perlu mengusung konsep transparansi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui metode CAT. Dengan mengusung konsep transparansi dalam sistem ini diharapkan tercipta opini publik yang positif selaku peserta seleksi. Namun opini publik itu tergantung stimulus yang diterima.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh opini yang positif terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT karena informasi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta tersedia secara memadai dan mudah dimengerti. Hal ini sesuai dengan konsep transparansi yang dikemukakan Ratminto dan Winarsih (2005). Dengan terpenuhinya konsep transparansi sebagai perwujudan kualitas pelayanan prima maka tujuan pelayanan publik tercapai yaitu memuaskan masyarakat dengan begitu seleksi penerimaan CPNS melalui metode *Computer Assisted Test* bisa memuaskan masyarakat pada umumnya dan peserta pada khususnya

Analisis Perbedaan Opini Peserta terhadap Transparansi seleksi Penerimaan CPNS melalui metode CAT

Perbedaan opini peserta terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT

akan dilakukan dengan membandingkan hasil skor rata-rata opini peserta lulus dan peserta tidak lulus terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT dimana transparansi terbagi atas keterbukaan informasi, ketersediaan informasi dan mudah dimengerti.

Adanya perbedaan atau persamaan opini pada hasil penelitian ini bukanlah hal yang perlu dipertentangkan hal ini dikarenakan secara keseluruhan individu dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh karakteristik biografikalnya seperti yang diungkapkan oleh Melvin defleur tentang teori perbedaan individu (*Individual Difference Teory*). Menurut teori ini individu-individu sebagai anggota khalayak sasaran media massa secara selektif menaruh perhatian kepada pesan-pesan terutama jika berkaitan dengan kepentingannya, konsisten dengan sikap-sikapnya, sesuai dengan kepercayaannya yang didukung oleh nilai-nilainya. Tanggapan terhadap pesan-pesan tersebut diubah oleh tatanan psikologisnya. Jadi, efek media massa itu tidak seragam, melainkan beragam disebabkan secara individual berbeda satu sama lain dalam struktur kejiwaan.

Perbedaan respon ini menurut Melvin De Fleur (McQuail, 1994 : 235) telah dijelaskan dalam teori perbedaan individu (*the individual differences theory of mass communication effects*) dengan asumsi bahwa masing-masing individu memiliki motivasi dan pengalaman yang berbeda sebagai hasil belajar dari lingkungannya yang berbeda-beda pula. Dari lingkungannya yang berbeda ini, akan terbentuk

sikap, kecerdasan, minat, nilai-nilai serta kepercayaan individu yang mendasari kepribadian mereka, kemudian akan mempengaruhi cara mereka memandang dan menghadapi sesuatu. Persepsi mereka pun ikut berbeda sehubungan dengan perbedaan kepribadian. Hal ini khususnya relevan bila dikaitkan dengan kerumitan pesan media umumnya dan bila dibandingkan dengan jenis rangsangan yang digunakan dalam hampir seluruh percobaan psikologi.

Seperti halnya peserta seleksi penerimaan CPNS yang merupakan individu yang berbeda secara psikologis. Mereka berasal dari lingkungan yang berbeda sehingga sikap, kecerdasan, minat, nilai-nilai serta kepercayaannya mempengaruhi cara pandang mereka. Mereka juga berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga opini mereka terhadap seleksi CPNS melalui metode CAT juga bisa berbeda.

Bila dikaitkan dengan kerumitan pesan media, opini peserta juga bisa berbeda. Hal ini dikarenakan CAT yang memanfaatkan jaringan internet dalam bertransaksi informasi. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang *familiar* dengan internet, tidak semua peserta seleksi penerimaan CPNS terbiasa dengan internet, ditambah lagi dengan peserta yang berasal dari daerah yang belum ada akses internet. Sehingga hal ini juga bisa menimbulkan perbedaan opini terhadap seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT. Pengujian hasil hipotesis yang menunjukkan adanya perbedaan antara peserta lulus dan tidak

lulus membuktikan adanya perbedaan opini dari terpaan isi pesan media. Isi pesan media dalam transparansi informasi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT terlihat dari apakah isi pesan media itu mudah dimengerti atau tidak. Dalam penelitian ini perbedaan itu diperoleh dari dimensi mudah dimengerti. Artinya peserta lulus dan tidak lulus berbeda dalam hal memaknai isi pesan media yang antara lain : perbedaan menginterpretasikan informasi pengumuman pendaftaran, informasi pengumuman kelulusan untuk setiap *session*, tampilan pada website resmi pendaftaran CPNS, tampilan pada layar komputer pada saat tes CAT, instruksi panitia tes CAT, dan materi soal tes CAT.

Hal ini paling memungkinkan terjadi perbedaan pada dimensi ini karena pada dimensi mudah dimengerti melibatkan kemampuan individu dalam menginterpretasikan makna dari pesan yang ada. Kemampuan individu setiap orang berbeda sesuai dengan sikap, kecerdasan, minat, nilai-nilai serta kepercayaan individu yang mendasari kepribadian mereka yang kemudian akan mempengaruhi cara mereka memandang dan menghadapi sesuatu sehingga opini mereka pun ikut berbeda terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT. Sekalipun secara uji statistik ada perbedaan opini peserta lulus dan tidak lulus, namun bukan berarti opini salah satu peserta negatif. Hal ini dikarenakan opini peserta lulus masuk dalam kategori sangat baik dan opini peserta tidak lulus berada pada kategori baik terhadap informasi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT.

Selain perbedaan opini, diperoleh juga persamaan opini antara peserta lulus dan tidak lulus. Dari hasil statistik uji perbedaan diperoleh bahwa tidak ada perbedaan opini peserta lulus dan tidak lulus pada dimensi keterbukaan dan ketersediaan informasi terhadap seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT sehingga bisa dikatakan bahwa opini peserta lulus dan tidak lulus pada kedua dimensi ini adalah sama. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Effendy (2003:275), sekalipun secara alamiah efek bervariasi sesuai dengan perbedaan individual itu tetapi dengan berpegangan tetap pada pengaruh variabel-variabel kepribadian (yakni menganggap khalayak memiliki ciri-ciri kepribadian yang sama) teori tersebut tetap akan memprediksi keseragaman tanggapan terhadap pesan tertentu (jika berlabel antara bersifat seragam).

KESIMPULAN

Seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat membentuk opini yang positif karena rata-rata opini peserta baik yang lulus maupun tidak lulus berada pada kategori baik yang berarti informasi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta tersedia secara memadai dan mudah dimengerti. Sistem CAT yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam seleksi penerimaan CPNS dinilai mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Perbedaan yang signifikan dari opini peserta lulus dan tidak lulus terdapat pada dimensi mudah dimengerti. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menginterpretasikan makna dan juga selisih rentang nilai antara peserta lulus dan tidak lulus cukup jauh dimana opini peserta lulus berada pada kategori sangat baik sedangkan opini peserta tidak lulus pada kategori baik namun secara umum bisa dikatakan tidak ada perbedaan opini antara peserta lulus dan tidak lulus terhadap transparansi seleksi penerimaan CPNS melalui metode CAT pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Ermelinda GP. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Elektronik Terhadap Kinerja Dosen Universitas Musamus Merauke. *Tesis*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Cangara Hafied. (2014). *Komunikasi dan Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Ed. 4, Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy Onong Uchjana. (2003). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hardianti Siti. (2011). Efektivitas Penerapan Metode CAT dalam Seleksi CPNS Berbasis Kompetensi di Badan Kepegawaian Negara. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta

Indarto Maroli J. (2012). Manajemen Komunikasi Pemerintah dan Transparansi Informasi. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Ishak. (2008). Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi. Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4, No. 2 pp 87.

Jogiyanto. (2003). *Analisis dan Desain Informasi*, Andi Yogyakarta.

Kim Pan Suk. (2007). *How to Build and Sustain Transparency and Accountability in Public Sector Yonsei University, Seoul*. Jakarta: UNDESA bekerjasama dengan Kementerian PAN, UNGC, dan UNDP.

Krina Lalolo Loina P. (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kriyantono Rachmat. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prihadi Syaiful F. (2004). *Assessment Centre Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS Badan Kepegawaian Negara. (2010). *CAT Untuk Indonesia*. Jakarta : Biro Humas dan Protokol BKN.

Rogers Everett M. (1986). *Communication Technology*. London: The Free Press, Collier Macmillan Publ.

Sinambela L.P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ratminto & Winarsih (2014). *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal Cetakan XII*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.